

KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2019-2021

Geraldo Steven Gohung¹, Vecky A.J Masinambow², Hanly F. Dj. Siwu³

^{1,2,3} *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

Email : gohunga@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari tahun 2020 hingga 2021 dari hasil publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan rumus analisis pertumbuhan belanja, dan juga digunakan alat analisis Compare Means Independent Sample T-Test dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 25. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja diketahui bahwa pertumbuhan belanja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 182.641.383.000, hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Sedangkan pertumbuhan belanja pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah positif atau lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 81.755.881.000, hal ini berarti bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya dari tahun sebelumnya.

Kata Kunci : Pendapatan; Belanja; Daerah; Pandemi Covid-19

ABSTRACT

One important aspect of the implementation of regional autonomy and decentralization that must be carefully regulated is the issue of regional financial management and the Regional Budget (APBD). This study uses data taken from 2020 to 2021 from the results of publications from the Central Statistics Agency (BPS) of North Sulawesi Province. The analytical method used in this study is a descriptive analysis method using the formula for analyzing expenditure growth, and also using the Compare Means Independent Sample T-Test analysis using SPSS 25 software. North Sulawesi in 2019 to 2020 is negative or smaller than the previous year, namely IDR 182,641,383,000, this means that in that year the local government of North Sulawesi Province has not been able to increase regional growth. Meanwhile, expenditure growth in 2020 to 2021 is positive or greater than the previous year, namely IDR 81,755,881,000, this means that the North Sulawesi provincial government has been able to increase regional growth from the previous year.

Keywords: Income; Shopping; Area; Covid-19 pandemic

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses modernitas yang tersadar dan terencana untuk menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan merupakan upaya nasional untuk untuk mewujudkan human ascend. Karena sifat hakiki manusia adalah makhluk multidimensional, maka pembangunan nasional menjadi wadah terakumulasinya berbagai program-program pembangunan yang berasal dari pembangunan daerah. Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai aspek yaitu sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pembangunan merupakan syarat penting bagi kemajuan suatu negara ataupun daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Todaro & Smith, 2006). Kegiatan pembangunan akan dapat terwujud secara efisien, terpadu dan berkelanjutan apabila terdapat arah dan tahapan pembangunan yang jelas. Perkembangan APBD terutama dari sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola

dengan baik, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang baik yaitu harus memperhatikan kepentingan publik maka realisasi pengalokasian dana terhadap kegiatan yang dibiayai akan memberikan manfaat sehingga mampu memenuhi kebutuhan publik, maka anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya alam sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kinerja pemerintah juga penting untuk dilihat dan diukur (Nurjana, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan/akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang/dana publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah yang baik mempertimbangkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dalam mengelola keuangan daerah akan memberikan informasi yang aktual dan faktual kepada publik, kemudian partisipasi publik/masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, serta akuntabilitas merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting, karena dengan adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi gambaran jelas tentang organisasi sektor publik dimasa mendatang. Untuk menilai kinerja pimpinan organisasi sektor publik juga dapat dengan menggunakan anggaran. Perencanaan anggaran yang kurang baik akan berdampak terhadap anggaran belanja yang terutang. Kecenderungan yang terjadi pada Kabupaten/Kota terkait perencanaan anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah adanya penyelewengan terhadap dana APBD seperti korupsi dana anggaran, ketimpangan yang terjadi terkait adanya pengeluaran-pengeluaran yang melebihi anggaran, serta adanya penggelembungan *mark up* belanja dari belanja wajar dan masih banyak lagi penyimpangan yang mungkin terjadi terkait anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul Kinerja Keuangan Daerah Sulawesi Utara Menghadapi Pandemi Covid-19.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, menyelapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan dan meningkatkan lapangan kerja. Turner & McCourt (2015) mendefinisikan perencanaan pembangunan merupakan proses modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pra modern ke bentuk penguasaan teknologi dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan ciri meningkatkan kesejahteraan ekonomi, stabilisasi politik seperti dunia barat., perencanaan pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi. Menurut Ningsih (2011) suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Islamiyah, 2021). Menurut Septian (2017) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai “suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Dengan demikian, dalam seluruh rangkaian perencanaan mencakup lima pendekatan, yaitu:

- Politik

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu,

rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/ Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

- **Teknokratik**
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- **Partisipatif**
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Menurut Sjafrizal (2018) perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia atau sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang pemerintahan. Langkah tersebut adalah:

- Menetapkan sasaran Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya agar lebih efektif.
- Merumuskan posisi organisasi pada saat ini Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui organisasi berada dimana saat ini dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika sebuah organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini.
- Mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran Selanjutnya perlu diketahui faktor faktor, baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam tahapan ini adalah pemahaman tentang apa yang akan terjadi pada saat ini dalam sebuah organisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapun sulitnya melihat ke depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan dan hal ini harus dipikirkan oleh sebuah organisasi.
- Menyusun langkah langkah untuk mencapai sasaran Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah

Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986). Kemampuan struktural organisasinya.

- Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah
Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
- Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.
- Kemampuan Keuangan Daerah.
Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang di tetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Bharata & Priyono (2019) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pembangunan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- Otoritas, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- Perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- Alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk mencitakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah.
- Distribusi, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Stabilisasi, anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar (Al Makka, 2015).

Menurut Herninasari (2019) Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas enam elemen yaitu: Pertama, pendapatan terdiri atas tiga komponen yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kedua, belanja, pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Ketiga, Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa Transfer/Bagi Hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota. Keempat, surplus/defisit selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran. Kelima, pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu: penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto. Keenam, SiLPA/AiKPA(Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. SiLPA/SiKPA dapat dihitung dari nilai pada pos Surplus/Defisit ditambah dengan pos Pembiayaan Neto.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Hasil akhir laporan realisasi anggaran ini kemudian akan dipindahkan neraca kelompok ekuitas dana lancar. Setiap laporan realisasi anggaran harus di susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). LRA dan SAP di nyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran.PSAP ini berisikan prinsip-prinsip mengenai LRA.Tujuan standar LRA menetapkan dasar- dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Lahirnya (Undang Undang (UU) No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan (Undang Undang (UU) No. 32 Tahun 2004), menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah

pembangunan daerah. Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. Objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas PPKAD. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian, dimana pada analisis keserasian dilakukan analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efisiensi belanja (Machmud, 2014).

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Merupakan Komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun Anggaran 2009-2012. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009-2012. Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB. Tahun 2009 terdapat selisih anggaran belanja sebesar Rp. 95.735.271.217,62, tahun 2010 Rp. 61.329.077.260,00, tahun 2011 Rp. 157.837.732.725,00, tahun 2012 Rp. 189.330.495.775,00. Tahun 2010 terjadi pertumbuhan realisasi belanja sebesar 9,96% dibanding tahun sebelumnya, tahun 2011 sebanyak 13,05%, tahun 2012 sebanyak 37,74%. Untuk analisis keserasian belanja, tahun 2012 rasio belanja operasi sebesar 69,013%, rasio belanja modal sebesar 19,795%, rasio belanja tak terduga 0,004%, rasio transfer bagi hasil 11,188%. Tahun 2009 realisasi belanja sebesar 91,53% dari yang dianggarkan, tahun 2010 hanya sebesar 94,88%, tahun 2011 hanya sebesar 89,07%, tahun 2012 hanya sebesar 90,34% (Liando & Elim, 2016).

Salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berhasil guna dan berdaya guna. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta diperlukan pengelolaan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keleluasan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih baik. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi serta pengelolaan keuangan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif dengan pendekatan secara Kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui pencarian data dan pengumpulan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dan Visualisasi Data APBD Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas 5 tahun terakhir masih berada pada rasio di atas 100 % kondisi ini menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif. Untuk tingkat efisiensi selama 5 tahun terakhir masih belum efisien karena rasionya belum mencapai rasio dibawah 90 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih kurang baik.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu di era otonomi ini kemampuan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah harus berjalan dengan baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pengumpulan data menggunakan teknik

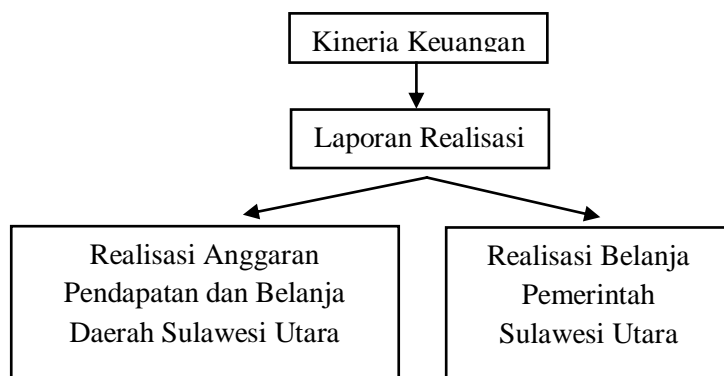
dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2010-2019. Data ini dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu Pertumbuhan PAD, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Operasi dan Rasio belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah bisa dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PAD yang positif, rata-rata derajat desentralisasi yang rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, dan rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah masih mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumusan Masalah yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana kinerja Penerimaan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Manado. Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Penerimaan dan Belanja Daerah di Kota Manado selain itu juga untuk dapat mengetahui pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran daerah Kota Manado, mengetahui efisiensi dan efektivitas Keuangan Daerah di Kota Manado.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah konsep yang menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian (Sugiyono, 2013).

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Skema berpikir Ilmiah Didasarkan pada kosnsep di atas bahwa kinerja keuangan di pengaruhi terhadap tiga variabel pokok yakni, Laporan Realisasi, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Utara dan Pemerintah Sulawesi Utara. Yang mana ini berpengaruh terhadap kinerja laporan daerah pada masa pandemi Covid-19. Variabel terkait masing- masing secara parsial maupun secara bersama sama atau simultan.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Berdasarkan evaluasi dan ketersediaan data, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu atau *time-series* tahun 2020-2021 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder,

yang merupakan data yang diperoleh melalui publikasi dari sumber-sumber lain seperti instansi, jurnal penelitian, koran, majalah, dan internet, buku, dan berbagai literatur lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, jurnal penelitian, tesis dan berbagai publikasi literatur lain yang berkaitan dengan studi ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode yang bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan variabel penelitian melalui berbagai sumber literatur dan institusi. Sumber literatur yang digunakan adalah publikasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, jurnal penelitian berkala efisiensi, jurnal nasional, jurnal nasional, skripsi, laporan dan artikel di internet, serta buku. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dari data-data yang telah dipublikasikan oleh berbagai instansi dan literatur yang berkaitan dengan studi ini (Hasanah, 2017).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Keuangan daerah yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah setiap hak yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk uang dan kewajiban yang harus dikeluarkan atau digunakan untuk kepentingan perkembangan daerah dalam bentuk uang yang dijadikan kekayaan daerah. Pendapatan daerah dalam penelitian ini adalah setiap penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam bentuk uang. Belanja daerah dalam penelitian ini adalah setiap dana yang dikeluarkan dan digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengembangan daerah Sulawesi Utara. Kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah seberapa besar persentase pertumbuhan realisasi belanja tahunan Provinsi Sulawesi Utara pada setiap tahun yang diteliti dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau bentuk kalimat (Rijali, 2019). Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis pertumbuhan belanja. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapat yang seimbang. Rumus Analisis Pertumbuhan Belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{(\text{Belanja Tahun } t) - (\text{Belanja Tahun } t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Untuk membantu melihat seberapa besar pertumbuhan belanja, digunakan juga alat analisis *Compare Means Independent Sample T-Test* dengan menggunakan software SPSS 25. Uji beda rata-rata (T-test) adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai yang dijadikan sebagai pembanding, berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sampel yang ada. Uji t-sampel tidak berhubungan (Independent Sample T-Test) adalah uji analisa statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Tabel 4.1 Uji Independent Sample T-Test

Group Statistics					
	Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Realisasi	Sebelum Pandemi Covid-19	3	3805368530.33	326142176.995	188298273.682
	Pada Masa Pandemi Covid-19	2	4037668394.50	57810137.857	40877940.500

Sumber: Olahan Data, 2022

Data diatas menunjukkan adanya rata-rata realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara yang lebih besar pada masa pandemi Covid-19. Berikut akan dilihat seberapa besar signifikansi perubahan pertumbuhan realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara. Digunakan bantuan data tahun 2018-2021 untuk memastikan keluarnya nilai signifikansi, mengingat data tahun 2022 belum ada pada saat pelaksanaan penelitian ini. Sehingga dapat dilihat bahwa total N dalam analisis ini adalah 5, karena menggunakan data 5 tahun yakni 2018 hingga 2021.

Tabel 4.2 Independent Sample T-Test

		Independent Samples Test									
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Confidence Interval of the Difference	
Realisasi	Equal variances assumed	F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
		Equal variances not assumed	5.979	.092	-.948	3	.413	-232299864.167	921	1011980	547380449.348
				-1.206	2.183	.342	-232299864.167	192684316.672	177.681	533511181.117	
									9981109	09.450	

Sumber: Olahan Data, 2022

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai *Sig. Levene's Test for Equality of Variances* adalah sebesar $0,092 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data antara realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara sebelum Covid-19 dan realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara pada masa Covid-19 adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output *Independent Samples Test* di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel "*Equal Variances Assumed*".

Berdasarkan tabel output *Independent Samples Test* pada bagian *Equal Variances Assumed*, diketahui nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar $0,413 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara sebelum pandemi Covid-19 dan realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara pada masa pandemi Covid-19.

Nilai *Mean Difference* yaitu $-232.299.864,167$ juga membuktikan bahwa realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara sebelum pandemi Covid-19 memiliki pendapatan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara pada masa Covid-19 sebesar Rp. 232.299.865,167.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan belanja Provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun, maka hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi dan tidak stabil. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan belanja mengalami tren yang negatif sebesar Rp. 182.641.383.000, realisasi belanja tahun 2019 lebih besar dari pada realisasi belanja tahun 2020 sehingga memberikan tren pertumbuhan belanja yang negatif. Hal ini disebabkan oleh menyebarnya pandemi Covid-19 di area Sulawesi Utara pada awal tahun 2020 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor yang dibutuhkan untuk peningkatan pendapatan daerah. Karena pendapatan daerah secara umum mengalami penurunan, maka realisasi belanja juga ikut mengalami penurunan karena menyesuaikan dengan tingkat pendapatan yang ada. Selama pandemi Covid-19, terjadi kemunduran besar-besaran dari berbagai sektor, terlebih sektor-sektor unggulan di Sulawesi Utara. Hal inilah yang membuat terjadinya penurunan pendapatan di setiap sektor yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi belanja pemerintah Sulawesi Utara.

Sementara, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan belanja mengalami tren positif yaitu sebesar Rp. 81.755.881.000, realisasi anggaran tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2021 atau bernilai positif. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan di berbagai sektor yang kembali pulih setelah pandemi Covid-19. Gencarnya program pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 terbukti memberikan hasil yang positif dengan pulihnya berbagai sektor unggulan Sulawesi Utara, seperti sektor pariwisata yang lumpuh pada tahun 2020, akhirnya bisa beroperasi lagi pada tahun 2021.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hikmah (2020) yang menunjukkan hasil dari Kabupaten Wajo dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pertumbuhan belanja mengalami penurunan sebesar Rp. 130,340,268,968.51, realisasi anggaran tahun 2017 lebih besar dari pada tahun 2018 atau bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan penggunaan anggaran di beberapa pos-pos belanja, selain itu anggaran belanja juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah Kabupaten Wajo belum mampu meningkatkan daerahnya. Sementara, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan belanja mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 144.355.558.406,09, realisasi anggaran tahun 2018 lebih kecil dari tahun 2019 atau bernilai positif. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan penggunaan anggaran di beberapa pos belanja, salah satunya kenaikan terbesar terjadi pada pos belanja modal yaitu sebesar Rp. 171.661.759.464,47 dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Wajo telah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya dari tahun sebelumnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sumarni, 2020) yang menunjukkan hasil Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan anggaran atau pertumbuhan negatif artinya pemerintah daerah belum mampu meningkatkan daerahnya, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan anggaran atau pertumbuhan positif (Hikmah, 2020).

5 PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja diketahui bahwa pertumbuhan belanja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 182.641.383.000, hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Sedangkan pertumbuhan belanja pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah positif atau lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 81.755.881.000, hal ini berarti bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya dari tahun sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan belanja

pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor domestik di Provinsi Sulawesi Utara secara khusus dan sektor nasional pada umumnya yang menyebabkan adanya pemulihan sektor pada tahun 2020-2021 yang menghasilkan adanya peningkatan pertumbuhan belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020-2021 sebesar Rp. 81.755.881.000 atau sebesar 2,05%.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Makka, H. (2015). Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Bharata, R. W., & Priyono, N. (2019). Badan Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Herninasari, F. P. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Pendukung Terhadap Kinerja Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Blitar)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Hikmah, H., Siagian, M., & Siregar, P. (2020). Analisis Tingkat Literasi Keuangan, Experienced Regret, dan Risk Tolerance pada Keputusan Investasi di Batam. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(1), 138–146.
- Hulme, D., Turner, M., & McCourt, W. (2015). *Governance, management and development: Making the state work*. Bloomsbury Publishing.
- Indonesia, R. (2004a). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang. *Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, R. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (Id): Ri*.
- Islamiyah, D. (2021). *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ira) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Ningsih, E. (2011). *Implementasi Rencana Penyusunan Anggaran Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat*. Universitas Brawijaya.
- Nurjana, W. I. (2018). *Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Survei pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Lowokwaru)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Septian, R. (2017). *Peranan Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan daerah ditinjau dari*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Studi kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Selatan). Universitas Bangka Belitung.

Sjafrizal, S. (2018). *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya Di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.

Syamsi, I. (1986). *Pokok-pokok kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional*. Rajawali.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *PEMBANGUNAN EKONOMI, edisi 9, jilid 1*. Erlangga.